



**PUTUSAN**

Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “ Cerai Talak “ antara :

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Jibubu, 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Desa Kabupaten Halmahera Selatan sebagai “Pemohon”;  
melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Bahu, 22 tahun, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Halmahera Selatan sebagai “Termohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 23 Agustus 2020 telah mengajukan Permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha, dengan Nomor 217/Pdt.G/2020/PA.Lbh, tanggal 24 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 16 Maret 2016 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, Propinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal, 16 Maret 2016 ;
2. Bahwa pada saat ini menikah Pemohon berstatus sebagai perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan;

Hal 1 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di rumah Kakak Pemohon di Desa Kawasi Obi sampai terjadi perpisahan, bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yakni : Anak, laki-laki 4 tahun saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, aman, dan damai, namun sejak tahun 2016 menikah sering terjadi pertengkaran adapun penyebabnya sebagai berikut :
  - a. Termohon lebih mendengarkan dan mengutamakan orangtua Termohon;
  - b. Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa puncak terjadinya perselisihan yakni pada akhir tahun 2016 saat mana orangtua Termohon menjemput Termohon setelah melahirkan dan tidak kembali sampai sekarang meskipun telah diminta secara baik baik oleh Pemohon yang sedang bekerja dan tidak mendapatkan cuti untuk menjemput Termohon hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan hubungan suami istri kurang lebih 3 tahun ;
6. Bahwa dengan Keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudan tidak ada hasrat dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dan harmonis lagi. dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan amarnya berbunyi:

### **PRIMER ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

### **SUBSIDAIR :**

Mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Hal 2 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



Bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat:**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rudi Sabar Nomor : XXXX, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 25 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan Nomor : XXXX Tanggal, 16 Maret 2016. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Asli Surat kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dari keluarga Termohon atas penyelesaian Penelantaran keluarga Termohon/ istri Pemohon menjelaskan bahwa pihak Pemohon telah membayar sejumlah uang Rp. 5.000.000,-, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

**B. Bukti Saksi:**

1. **Saksi 1**, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana, pekerjaan PNS di Kantor kementerian Agama, tempat kediaman di Desa Mandaong,

Hal 3 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah adik ipar saudara angkat saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon saat ada masalah di kantor kepolisian halsel;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di Obi, desa kawasi, dan setelah adanya pelaporan dari Termohon, Termohon tinggal di rumah keluarganya di Desa Tembal;
- Bahwa Pemohon dilaporkan ke kepolisian dikarenakan masalah penelantaran keluarga, ini yang menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu ada surat kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon tentang masalah kewajiban pemohon dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000.00,-;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016, saat Termohon baru selesai bersalin kurang lebih 20 hari dan orang tua Termohon menjemput Termohon untuk pulang dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehat Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon;

**2. Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon, karena Pemohon adalah adik saudara angkat saksi;
- Bahwa saksi kenal Termohon saat ada masalah di kantor kepolisian halsel;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tinggal di Obi, desa kawasi, dan setelah adanya pelaporan dari Termohon, Termohon tinggal di rumah keluarganya di Desa Tembal;

Hal 4 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilaporkan ke kepolisian dikarenakan masalah penelantaran keluarga, ini yang menyebabkan hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tahu ada surat kesepakatan bersama antara pemohon dan termohon tentang masalah kewajiban pemohon dengan membayar uang sejumlah Rp. 5.000.00,-;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak tahun 2016, saat Termohon baru selesai bersalin kurang lebih 20 hari dan orang tua Termohon menjemput Termohon untuk pulang dan tidak kembali lagi;
- Bahwa saksi sudah menasehat Pemohon, tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali lagi dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan Pemohon dan mohon Majelis Hakim mengabulkan Permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan serta Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo adalah menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Labuha berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 49 huruf "a" Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, untuk tetap bersabar dan mempertahankan

Hal 5 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 84 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat diterapkan, disebabkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya secara sah untuk datang menghadap di persidangan serta ketidakhadirannya itu tidak diketahui adanya sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه**

Artinya : *"Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut";*

Menimbang, bahwa inti pokok permasalahan yang didalilkan Pemohon antara lain kehidupan rumah tangganya pada mulanya berjalan harmonis, namun sekarang tidak harmonis disebabkan Termohon lebih mendengarkan dan mengutamakan orangtua Termohon, Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri kurang lebih 3 tahun. Puncaknya pada akhir 2016 saat mana orangtua Termohon menjemput Termohon

Hal 6 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melahirkan dan tidak kembali sampai sekarang meskipun telah diminta secara baik baik oleh Pemohon yang sedang bekerja dan tidak mendapatkan cuti untuk menjemput Termohon hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak saling menjalankan hubungan suami istri kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon telah terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun karena perkara ini menyangkut *personal recht* (hukum perorangan), yaitu bidang sengketa perkawinan (perceraian), maka untuk menghindari adanya kompromi dari kedua belah pihak, Majelis Hakim berpendapat, Pemohon patut dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan yang terdapat pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1, dan P.2, serta 2 orang saksi, dan diniali oleh majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti bukti-bukti surat Pemohon tersebut, Majelis menilai bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah alat bukti berbentuk akta otentik yang dibuat sesuai Pasal 285 R.Bg, dan Pasal 1868 KUHPerdara dimana kekuatan bukti akta otentik bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Pemohon bernama Rudi bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi kutipan akte nikah) yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang melahirkan fakta adanya peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Akta Nikah tersebut merupakan salah satu bentuk akta otentik yang membuktikan adanya hubungan hukum berupa ikatan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dinyatakan dapat diterima serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Kesepakatan Bersama) yang menjelaskan mengenai kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon

Hal 7 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyelesaikan permasalahan penelantaran keluarga yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan 2020 yang diselesaikan secara kekeluargaan, bukti tersebut berisi kesepakatan Pemohon membayar sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan bersedia untuk bercerai dengan Termohon, bukti tersebut merupakan akta dibawah tangan dan dapat diterima sesuai dengan pasal 1874 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan orang dekat dengan Pemohon sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang saksi, yaitu **Wahid bin Anwara** dan **Misra Kausaha binti Kausaha**, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan formil, karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam kasus perceraian, dan telah diperiksa satu persatu. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 171-176 R.Bg., secara formil alat bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon pergi dijemput keluarganya saat setelah melahirkan yang kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi dengan masalah penelantaran keluarga yang telah diselesaikan secara kekeluargaan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan pada pengetahuan dan pengelihatn langsung, dan keterangannya saling terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat diatas dipandang

Hal 8 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat *formil* maupun *materil*, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua saksi Pemohon terbukti fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis disebabkan Termohon pergi dijemput keluarganya saat setelah melahirkan yang kemudian Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi dengan masalah penelantaran keluarga yang telah diselesaikan secara kekeluargaan, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah selama 3 tahun;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk bercerai;
- bahwa saksi sudah menasihati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Pemohon adalah ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan secara pasti penyebab dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon karena didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama menikah sampai sekarang menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang

Hal 9 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak demikian adanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan kuat salah satu pihak untuk bercerai merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada i'tikad baik untuk melanjutkan kehidupan rumah tanganya sehingga hakikat dan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* atas dasar ridha Allah sulit untuk dicapai sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 oleh karena itu kedua belah pihak dapat menentukan jalan hidupnya masing-masing agar tidak lebih jauh melanggar norma-norma hukum dan agama, maka perceraian dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya: *"Dan Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*.

Memperhatikan pendapat ahli hukum Islam, Dr. Ahmad Al Ghundur dalam Kitab *Ath Thalaq minasy Syari'atil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 dan menukilnya sebagai pendapat majelis:

**إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله**

Artinya: *"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan serta sangat kuatnya keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan usaha perdamaian yang telah ditempuh baik melalui keluarga, majelis hakim dan mediasi tidak berhasil maka mempertahankan rumah

Hal 10 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga seperti itu cenderung lebih banyak mudharatnya dari pada mamfaatnya, sedangkan kemudharatan sekecil apapun harus dihilangkan hal ini sesuai dengan kaedah ushul Fiqhi yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم المفساد درء

Artinya : *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan dari pada menarik suatu kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala rentetan peristiwa dan latar belakang perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat *broken marriage* sehingga kalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan hidup dalam suatu ikatan perkawinan maka yang terjadi bukan keharmonisan hidup tetapi kedua belah pihak akan menderita kerusakan mental (mental disorder) sehingga Majelis Hakim berkeyakinan perceraian sudah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam perkawinan yang senantiasa diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai dengan maksud Pasal 115, 118, dan Pasal 184 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**); di depan sidang Pengadilan Agama Labuha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 266.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Kamis tanggal 08 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1442 H, oleh kami **Mujitahid, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Khoirul Anam, S.H.** dan **Fuad Hasan, S.Sy.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan **Dra. Nya Iba Khwe.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Khoirul Anam, S.H.**  
Hakim Anggota II,

**Mujitahid, S.H., M.H.**

**Fuad Hasan, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Nya Iba Khwe**

Rincian Biaya Perkara:

Hal 12 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses/ ATK	: Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBP Pertama Panggilan	: Rp.	20.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

---

<b>Jumlah</b>	: <b>Rp.</b>	266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)		

Hal 13 dari 13 Put. No. 217/Pdt.G/2020/PA Lbh